

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGANGGURAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Stelma Diane Anita Tumbel¹, Rosalina A.M. Koleangan², Daisy S.M. Engka³

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan atau kemajuan dengan melakukan upaya ke arah perubahan yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah mencakup seluruh sistem yang ada dalam suatu wilayah atau negara seperti sistem politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan serta budaya. Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya ialah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh belanja pemerintah dan investasi terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah dan investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pengangguran akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kabupaten Minahasa Selatan.

Kata Kunci: *Belanja Pemerintah, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran*

ABSTRACT

Development is a process of improvement or progress by making efforts toward a better change. The change in question covers all existing systems within a region or country such as political, economic, infrastructure, defense, education and technology, institutional and cultural systems. Economic development of a region is essentially a series of activities that are carried out consciously and continuously to realize a better state together and sustainable. Within that framework, economic development is also to stimulate equity of development and its results in order to improve the welfare of the people fairly and equitably. One important benchmark in determining the success of economic development is economic growth that illustrates a real impact of development policies implemented.

The purpose of this study is to analyze how the influence of government spending and investment on unemployment through economic growth in South Minahasa District. Analytical technique used is path analysis (Path Analysis). The results show that government spending and investment have a positive effect on economic growth in South Minahasa regency but not statistically significant. Government spending has a positive effect on unemployment but is not statistically significant. Investment and economic growth negatively affect unemployment in South Minahasa District.

Keywords: *Government Expenditure, Investment, Economic Growth, Unemployment*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan atau kemajuan dengan melakukan upaya ke arah perubahan yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah mencakup seluruh sistem yang ada dalam suatu wilayah atau negara seperti sistem politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan serta budaya. Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya ialah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan *output* dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain oleh besarnya investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh para investor di suatu negara atau daerah. Menurut Harrod-Domar (Dalam Murni 2006: 185), bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh atau *steady growth* dalam jangka panjang yaitu perlunya investasi, dan untuk menciptakan investasi perlu meningkatkan tabungan. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk menyimpan sebagian dari pendapatannya guna meningkatkan tabungan.

Selain itu peranan pemerintah juga penting terutama dalam hal merencanakan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dalam menghimpun dana untuk keperluan investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi terutama di negara yang sedang berkembang dilakukan melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter memainkan peranan penting dalam mempercepat pembangunan dengan mempengaruhi biaya dan tersedianya kredit, dengan mengendalikan inflasi, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Melalui kebijakan fiskal pemerintah mencoba memperbaiki ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan yang melebar bersama pembangunan. Kebijaksanaan ini akan memperluas pasar internal, mengurangi impor yang tidak penting, meniadakan tekanan inflasioner, merangsang berbagai jenis proyek pembangunan yang diinginkan. Semuanya itu dapat dilakukan pemerintah dengan menerapkan kebijakan yang tepat dalam bidang perpajakan, anggaran, pendapatan, belanja atau pengeluaran, dan pinjaman negara (Jhingan, 1996 : 558).

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu daerah yang terdapat di Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Selatan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa, Timur Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara, selatan Berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bagian Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai luas 1.484,47 km², yang berdasarkan pembagian wilayah administratif pemerintah daerah dibagi dalam 17 (tujuh belas) kecamatan, 167 desa dan 10 kelurahan. Status kelurahan hanya ada pada Kecamatan Amurang, Amurang Timur dan Amurang Barat, dimana sebagian besar wilayah

Minahasa Selatan memiliki topografi bergunung-gunung yang membentang dari utara ke selatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 204.983 jiwa.

Hal ini menyebabkan letak geografis kabupaten Minahasa Selatan berada pada posisi strategis karena berada pada jalur lintas darat trans sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Pada pesisir jalur laut bagian utara merupakan daerah yang strategis untuk pengembangan produksi perikanan di Kawasan Timur Indonesia serta daerah perlintasan (transit) sekaligus *stop over* arus penumpang, barang dan jasa pada kawasan Indonesia tengah dan kawasan Indonesia timur bahkan untuk kawasan Asia Pasifik. Hal ini disebabkan letak geografis Minahasa Selatan yang berada pada ALKI II (alur laut kepulauan Indonesia) sehingga membuat Minahasa Selatan menjadi daerah yang strategis dari sisi perhubungan laut. Posisi Minahasa Selatan juga sangat dekat dengan Ibu Kota Provinsi yaitu Kota Manado sebagai pusat di Sulawesi Utara dan Kota Bitung sebagai pusat industri dan pelabuhan Internasional (IHP, international hub port). Hal ini akan sangat menunjang pada penetapan Minahasa Selatan sebagai kawasan cepat tumbuh.

Realisasi Belanja dalam APBD merupakan kenyataan mengenai pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan merupakan sumber pembelanjaan dan pengeluaran bagi pemerintah daerah amanah Undang-Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu berdasarkan semangat otonomi daerah dalam menjalankan amanat Undang – Undang maka sudah seharusnya pemerintah daerah bijak dalam pengelolaan keuangan daerah sebab dengan adanya dana dalam jumlah besar yang diberikan oleh pemerintah pusat yang ditunjang oleh PAD maka sudah seharusnya setiap pengeluaran dan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mampu memberikan dampak bagi perekonomian terutama terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Tabel 1 Perkembangan Belanja Pemerintah, Investasi , PDRB (Atas Harga Konstan) dan Pertumbuhan Ekonomi Minahasa Selatan Periode 2011-2015

Tahun	Belanja Pemerintah (Jutaan Rp)	Investasi (Jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)	Pengangguran
2011	300.752.246.760	189.276.218.000	3.83	7.167
2012	325.307.511.200	189.276.218.000	6.13	5.716
2013	378.407.361.434	326.997.664.000	6.61	6.030
2014	427.802.841.793	1.884.997.664.000	6.70	5.090
2015	445.439.993.681	1.964.541.611.000	6.21	6.609

(Sumber : Badan Pusat Statitisk Sulawesi Utara, 2017)

Belanja Pemerintah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan pada tahun 2015 belanja pemerintah sebesar 445.439.993.681 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 2014 sebesar 427.802.841.793. Pengeluaran pemerintah di Kabupaten Minahasa Selatan di harapkan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun menarik investor dengan cara menyediakan infrastruktur pendukung dan juga perkembangan belanja pemerintah yang meningkat dari tahun ke tahun diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi lewat penciptaan lapangan kerja, sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh investasi yang terealisasi baik dalam rangka PMDN maupun PMA. Diharapkan dengan meningkatnya investasi akan mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memperluas lapangan kerja di semua sektor ekonomi sehingga angka pengangguran dapat di turunkan dan kemiskinan dapat dikurangi. Jumlah investasi PMDN/PMA yang telah disetujui dan terealisasi di kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011 sebesar 189,276 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2015 telah mengalami kenaikan yang signifikan dan tercatat sebesar 1,964 triliun dengan jumlah proyek tahun 2015 sebanyak 14 proyek (RPJMD Minahasa Selatan 2016-2021). Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA dan PMDN di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2011-2015 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2011 jumlah tenaga kerja sebesar 93.221 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 96.420 atau meningkat sebanyak 3.199 orang. Dengan meningkatnya pencari kerja di Kabupaten Minahasa Selatan baik lulusan dari Perguruan Tinggi maupun lulusan SMA/SMK maka pemerintah daerah perlu terus menggalang iklim investasi daerah agar para investor baik dalam negeri maupun luar negeri dapat tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Minahasa Selatan.

Menurut Sadono Sukirno (2006 : 168) salah satu penentu pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut sering kali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat maka pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan-jalan, pelabuhan dan mengembangkan pendidikan. Usaha seperti memerlukan banyak uang dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayainya, sehingga untuk memperoleh dana yang diperlukan pemerintah terpaksa meminjam dan mencetak.

Tinjauan Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun (Prasetyo, 2009). Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.

Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006). Pembangunan ekonomi juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2004). Konsep PDB digunakan pada tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota digunakan konsep konsep PDRB. PDB atau PDRB dapat diukur dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan dan pengeluaran (Tambunan, 2003). Pendekatan

produksi dan pendapatan adalah pendekatan dari sisi penawaran agregat (Aggregate Supply) sedangkan pendekatan pengeluaran adalah pendekatan dari sisi permintaan agregat (Aggregate Demand).

Belanja Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh belanja pemerintah. Semakin besar kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Nasional Bruto (GNP), yakni ukuran yang kasar mengenai peran pemerintah dalam suatu perekonomian. (Suparmoko : 2000). Belanja pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan dan memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang public dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintah (pusat-provinsi-daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir-proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang dibawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi. (Lee dan Johnson : 1998).

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. (Sadono Sukirno : 2000). Menurut Mangkoesubroto (1998;169) Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian. Menurut Sadono Sukirno (2006 : 168) salah satu penentu pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut sering kali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat maka pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan-jalan, pelabuhan dan mengembangkan pendidikan. Usaha seperti memerlukan banyak uang dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayainya, sehingga untuk memperoleh dana yang diperlukan pemerintah terpaksa meminjam dan mencetak.

Investasi

Menurut Boediono (2001 : 40-41) investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh produsen (swasta) untuk pembelian barang-barang dan jasa untuk tujuan penanaman modal yakni untuk menambahkan stok di gudang atau perluasan pabrik. Sektor perusahaan membeli barang bukan untuk tujuan konsumsi seperti yang sering dilakukan oleh sektor rumah tangga, tetapi untuk tujuan investasi ini berarti bahwa barang-barang tersebut dibeli dengan harapan

untuk menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Ini selanjutnya berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh perusahaan dalam memutuskan apakah membeli atau tidak membeli barang-barang dan jasa adalah harapan dari pengusaha akan kemungkinan keuntungan yang bisa di peroleh dengan menjual kemudian barang-barang tersebut atau menggunakannya untuk proses produksi. Arah keuntungan inilah yang merupakan faktor utama dalam keputusan tersebut.

Investasi merupakan komponen yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Beberapa komponen percepatan pertumbuhan ekonomi seperti akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi, maka investasi sebagai akumulasi modal menjadi faktor dominan dalam memperbaiki dan melipatgandakan kualitas sumber daya fisik dan sumber daya manusia (Todaro & Smith, 2008).

Faizal (2009) menjelaskan bahwa dilihat dari manfaat yang ditimbulkannya, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik) ; Investasi yang bermanfaat untuk umum atau publik seperti investasi di bidang infrastruktur seperti jalana, jembatan, pelabuhan, pasar, investasi dibidang konservasi alam, investasi dibidang pengelolaan sampah, investasi dibidang teknologi, investasi dibidang penelitian dan pengembangan, investasi di bidang olahraga, investasi di bidang pertahanan keamanan, serta investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu ; investasi yang mendatangkan manfaat pada kelompok masyarakat tertentu seperti investasi di bidang keagamaan, membangun sarana ibadah dan sarana agama lainnya, investasi pada lembaga pendidikan dan sumber daya manusia, investasi dibidang olahraga tertentu, dan investasi dibidang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat dan kelompok tertentu.
- Investasi yang bermanfaat bagi pribadi atau rumah tangga ; investasi yang mendtangkan manfaat bagi pribadi atua rumah tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa mendatang seperti investasi untuk mperumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk usaha guna mendapatkan penghasilan, serta investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga.

Jenis investasi secara garis besar dapat dibagi atas dua kategori, yaitu (1) investasi sektor riil dan (2) investasi sektor finansial. Investasi sektor riil adalah investasi terhadap barang-barang yang tahan lama (barang-barang modal), sedangkan investasi sektor financial adalah investasi terhadap surat- surat berharga di pasar modal seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Kegiatan investasi dalam suatu perekonomian dapat mendorong naik turunnya tingkat perekonomian negara yang bersangkutan karena mampu meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan dan pemerintah secara keseluruhan untuk membeli barang-barang modal riil baik untuk mendirikan perusahaan baru maupun untuk memperluas usaha yang telah ada dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan untuk melakukan investasi. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2006).

Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Fator utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw,2000).

Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan :

a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*)

Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)

- 1) Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
- 2) Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

2. METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter data dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan mendatangi langsung sumber data dan mengumpulkan data sekunder yang telah ada di instansi terkait.

Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel

Data yang digunakan dalam model penelitian ini akan disajikan pada lampiran. Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Pemerintah adalah Dana realisasi pengalokasian belanja pemerintah yang di ukur dalam satuan milyaran Rupiah dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Minahasa Selatan
2. Investasi ialah dana yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat secara ekonomis dan dinyatakan dalam rupiah.
3. Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari kegiatan PDRB dari berbagai macam sektor-sektor yang ada Atas Dasar Harga Konstan dalam perhitungan presentase mulai dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya yang dinyatakan dalam jiwa.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sedangkan intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung.

Analisis Path

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Menurut *Retherford* (1993) Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regres berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung (*Sunyoto, 2012:1*). Sedangkan menurut *Webley* (1997) mengatakan analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel (*Sunyoto, 2012:1*). Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur merupakan kepanjangan dari regresi berganda.

Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung (pemberi respon) sedangkan yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga penghitungan uji keselarasan statistik (*Garson, 2003*).

Manfaat Analisis Jalur

Ada beberapa manfaat dari model path analysis, antara lain :

1. untuk penjelasan terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti;
2. untuk prediksi nilai variable terikat (Y) berdasarkan nilai variable bebas (X) dan prediksi ini bersifat kualitatif;
3. factor determinan yaitu penentuan variable bebas (X) mana yang berpengaruh dominan terhadap variable terikat (Y), juga dapat digunakan untuk menelusuri (jalur-jalur) pengaruh variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y).

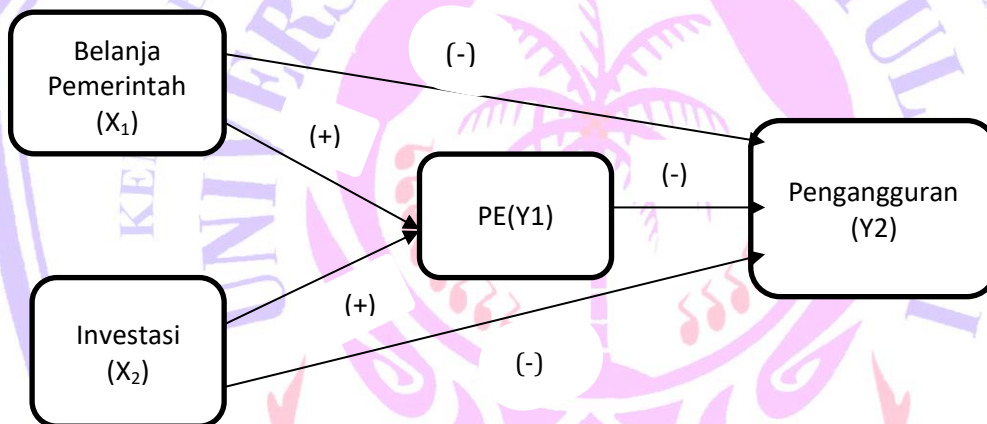
Asumsi-asumsi Analisis Jalur

Berikut ini asumsi-asumsi yang mendasari path analysis (menurut *Riduwan* dan *Kuncoro, (2007.p2)* yaitu :

- a. pada model *path analysis*, hubungan antar variabel adalah bersifat linear, adaptif dan bersifat normal;
- b. hanya sistem aliran kausal ke satu arah, artinya tidak ada arah kausal yang berbalik;
- c. variable terikat (endogen) minimal dalam skala ukur interval dan ratio;
- d. menggunakan sampel probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel;
- e. *observed variables* diukur tanpa kesalahan (instrument pengukuran valid dan reliable) artinya variable yang dipilih dapat diobservasi secara langsung;
- f. model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan artinya model teori yang dikaji atau diuji dibangun berdasarkan kerangka teoritis tertentu yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variable yang diteliti.

Diagram Jalur

Sesuai dengan judul yang diambil maka berikut ini akan ditampilkan model analisis dua jalur dalam gambar 2.1 sebagai berikut :



Keterangan :

- X₁ = Belanja Pemerintah
- X₂ = Investasi
- Y₁ = Pertumbuhan Ekonomi
- Y₂ = Pengangguran
- α = Konstanta/ Intercept
- β = Koefisien Regresi
- e = Standar Error

Gambar 2.1 Struktur Model Penelitian

Terlihat pada gambar 2.1 bahwa setiap variabel memiliki hubungan antara lain, baik adanya hubungan secara langsung maupun secara tidak langsung dan memiliki variabel endogen dan eksogen. Pengaruh tidak langsung suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen adalah melalui variabel lain yang disebut variabel antara (*intervening variable*). Dalam gambar 2.1 variabel Belanja Pemerintah dan variabel Investasi berpengaruh langsung terhadap

variabel Pertumbuhan Ekonomi, dan kemudian berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Persamaan Substruktur 1

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan *SPSS 8.0* untuk mengetahui pengaruh antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE_Y) (variabel dependen) dengan Belanja Pemerintah (BP_{X1}) dan Investasi (Inv_{X2}) (variabel independen).

Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

$$Y = a_1X_1 + a_2X_2 + E_1$$

$$PE_Y = 3.2900 (BP_{X1}) + -1.4500 (Inv_{X2}) + 0.294E_1$$

**Tabel 2 Hasil Regresi Persamaan Substruktur 1
Belanja Pemerintah (BP) dan Investasi (Inv) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)**

Variabel	Coefficient	t- statistic	Probabilitas
BP (X1)	3.2900	1.833093	0.2082
Inv (X2)	-1.4500	-1.194769	0.3546
$R^2 = 0.706$		F- statistic = 2.402801	

Sumber : Data olahan SPSS versi. 8.0

Hasil output SPSS versi 8.0 diatas, diketahui pada persamaan substruktur 1 dalam model penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji besar pengaruh nilai Belanja Pemerintah (X1) dan Investasi (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil estimasi memiliki koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.706 atau 70.6%. Nilai ini memiliki arti bahwa variabilitas Pertumbuhan Ekonomi yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel Belanja Pemerintah serta Investasi adalah sebesar 70.6% sedangkan sisanya sebesar 29.4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model ini.

Hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai Belanja Pemerintah (X1) memiliki pengaruh positif (+) terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 3.2900. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif (+) antara Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Akan tetapi, tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 90%. Hasil dari perhitungan menunjukkan angka t hitung sebesar 1.833093 < t tabel sebesar 2.35. Dengan demikian keputusannya ialah H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada hubungan linier antara Variabel Independen Belanja Pemerintah terhadap Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi. Maka Variabel Belanja Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Belanja Pemerintah memberikan pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2014) Belanja

Pemerintah berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Belanja Pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan secara signifikan.

Hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai Investasi (Inv) memiliki pengaruh negatif (-) terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar -1.4500. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif (+) antara ke duanya. Akan tetapi, nilai investasi tersebut mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada tingkat keyakinan 90%. Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar $0.3546 < t$ tabel sebesar 2.35. Dengan demikian keputusannya ialah H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada hubungan linier antara Variabel Independen investasi terhadap Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi. Maka Variabel Independen investasi tidak berpengaruh terhadap Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi. Secara keseluruhan, variabel nilai Belanja Pemerintah dan Investasi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{stat} sebesar 2.402801 yang lebih kecil dari pada nilai F_{tabel} sebesar 10.13 pada tingkat keyakinan 95%.

Persamaan Substruktur 2

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen Belanja Pemerintah, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap variabel independen Pengangguran. Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

$$Y_2 = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3Y_1 + e_t$$

$$\text{Pengangguran} = 2.4300 (BP_{X1}) - 1.1800 (Inv_{X2}) - 482.5647 (PE) + 0,534$$

Tabel 3 Hasil Regres Persamaan Substruktur 2 Belanja Pemerintah (X1), Investasi (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y1) Terhadap Pengangguran (Y2)

Variabel	Coefficient	t- statistic	Probabilitas
BP (X1)	2.4300	0.927815	0.5238
Inv (X2)	-1.1800	-0.832092	0.5582
PE (Y1)	-482.5647	-0.765426	0.5841
$R^2 = 0.466$	F- statistic = 0.291039		

Sumber : Data olahan SPSS Versi. 8.0

Hasil output SPSS diatas, diketahui pada persamaan struktur II dalam model penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji besar pengaruh Belanja Pemerintah dan Investasi terhadap Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil estimasi memiliki koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,466 atau 46.6%. Nilai ini memiliki arti bahwa variabilitas Pengangguran yang dapat dijelaskan dengan menggunakan

variabel Belanja Pemerintah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 46.6%, sedangkan sisanya sebesar 53.4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model ini. Hasil estimasi, didapatkan hasil bahwa nilai Belanja Pemerintah (X_1) memiliki pengaruh positif (+) terhadap pengangguran sebesar 2.4300. Hasil ini ternyata tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif (-). Akan tetapi, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran pada tingkat keyakinan 90%. Hasil dari perhitungan menunjukkan angka t hitung sebesar $0.5238 < t$ tabel sebesar 6.31. Dengan demikian keputusannya adalah H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada hubungan linier antara Variabel Independen Belanja pemerintah terhadap Variabel Dependen pengangguran.

Pengaruh tidak langsung variabel Belanja Pemerintah dan pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi ($X_1 - Y_1 - Y_2$). Belanja Pemerintah memiliki pengaruh yang secara tidak langsung terhadap pengangguran sebesar 1.8029. Hubungan positif antara belanja pemerintah terhadap pengangguran memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara statistik.

Hasil estimasi didapatkan bahwa Investasi (X_2) memiliki pengaruh negatif (-) terhadap pengangguran sebesar -1.1800. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif (-). Akan tetapi, mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap investasi pada tingkat keyakinan 90%. Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar $0.832092 < t$ tabel sebesar 6.31. Dengan demikian keputusannya adalah H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada hubungan linier antara Variabel Independen investasi terhadap Variabel Dependen pengangguran. Walaupun ada kenaikan atau penurunan akibat dari adanya kenaikan atau penurunan investasi tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

Pengaruh tidak langsung variabel investasi dan pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi ($X_2 - Y_1 - Y_2$). investasi memiliki pengaruh yang secara tidak langsung terhadap pengangguran sebesar 1.1754. Hubungan negatif antara investasi terhadap pengangguran akan tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik.

Hasil estimasi didapatkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki pengaruh negative (-) terhadap pengangguran sebesar -482.5647 akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran pada tingkat keyakinan 90%. Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar $0.7654 < t$ tabel sebesar 6.31. Dengan demikian keputusannya adalah H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada hubungan linier antara Variabel Independen Pertumbuhan Ekonomi terhadap Variabel Dependen pengangguran.

Secara keseluruhan, ketiga variabel belanja pemerintah, investasi dan Pertumbuhan Ekonomi mempunyai nilai yang tidak signifikan terhadap pengangguran. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{stat} sebesar 0.291039 lebih kecil dari pada nilai F_{tabel} sebesar 18.51 pada tingkat keyakinan 95%.

Korelasi Antar Variabel

Berdasarkan hasil estimasi, diketahui bahwa korelasi antar variabel belanja pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara individual sebagai berikut.

Tabel 4 Korelasi pada Persamaan Substruktur 1

Variabel	BP	Inv	PE
BP	1	0,916	0,705
Inv	0,916	1	0,461
PE	0,705	0,461	1

Sumber : Data olahan SPSS Ver.18

- 1) Korelasi anatar belanja pemerintah dan investasi sebesar (r_1) 0.916 kriteria positif dengan signifikansi sebesar 0,15 atau 15.0% yang berarti tidak signifikan.
- 2) Korelasi antara investasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar (r_2) 0.461 kriteria positif dengan signifikansi sebesar 0,217 atau 21.7 % berarti tidak signifikan.
- 3) Korelasi antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sebesar (r_3) -0,705 kriteria positif dengan signifikansi sebesar 0,092 atau 09.2% berarti tidak signifikan.

Korelasi Secara Keseluruhan

Berdasarkan hasil estimasi, diketahui bahwa korelasi antar variabel belanja pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran secara keseluruhan sebagai berikut.

Tabel 5 Korelasi pada Persamaan Substruktur 2

Variabel	BP	Inv	PE	Pengangguran
BP	1	0,916	0,705	0,221
Inv	0,916	1	0,461	0,072
PE	0,705	0,461	1	0,000
Pengangguran	0,221	0,072	0,000	1

Sumber : Data olahan SPSS Ver.18

1. Korelasi antara belanja pemerintah dan pengangguran sebesar (r_1) 0.221 kriteria positif dengan signifikansi sebesar 0,361 atau 36.1% yang berarti tidak signifikan hubungan kedua variabel tersebut
2. Korelasi antara investasi dan pengangguran sebesar (r_1) -0,072 kriteria negatif dengan signifikansi sebesar 0,454 atau 45.4% yang berarti tidak signifikan hubungan kedua variabel tersebut

3. Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran (r_1) 0.000 kriteria positif dengan signifikansi sebesar 0,500 atau 50.0% yang berarti tidak signifikan hubungan kedua variabel tersebut.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai Belanja Pemerintah (X1) memiliki pengaruh positif (+) terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi (PE). Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif (+) antara Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Belanja Pemerintah memberikan pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2014) Belanja Pemerintah berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Belanja Pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan secara signifikan. Hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai Investasi (Inv) memiliki pengaruh positif (+) terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi (PE). Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif (-) antara ke duanya dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada tingkat keyakinan 90%. Artinya tidak ada hubungan linier antara Variabel Independen investasi terhadap Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi. Maka Variabel Independen investasi tidak berpengaruh terhadap Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil estimasi, didapatkan hasil bahwa nilai Belanja Pemerintah (X1) memiliki pengaruh positif (+) terhadap pengangguran. Hasil ini ternyata tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif (-). Pengaruh tidak langsung variabel Belanja Pemerintah dan pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi ($X_1 - Y1 - Y2$). Belanja Pemerintah memiliki pengaruh yang secara tidak langsung terhadap pengangguran. Hubungan positif antara belanja pemerintah terhadap pengangguran memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara statistik. Hasil estimasi didapatkan bahwa Investasi (X2) memiliki pengaruh negatif (-) terhadap pengangguran. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif (+) dan tidak signifikan secara statistic artinya tidak ada hubungan linier antara Variabel Independen investasi terhadap Variabel Dependen pengangguran. Walaupun ada kenaikan atau penurunan akibat dari adanya kenaikan atau penurunan investasi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Pengaruh tidak langsung variabel investasi dan pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi ($X_2 - Y1 - Y2$). investasi memiliki pengaruh yang secara tidak langsung terhadap pengangguran. Hubungan negatif antara investasi terhadap pengangguran akan tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik. Hasil estimasi didapatkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki pengaruh negative (-) terhadap pengangguran dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran. Artinya tidak ada hubungan linier antara Variabel Independen Pertumbuhan Ekonomi terhadap Variabel Dependen pengangguran.

Saran

Bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lebih mengoptimal lagi untuk belanja pemerintah kearah pembangunan ataupun ke sektor-sektor yang mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Minahasa Selatan sehingga dengan adanya investor bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan memberikan dampak

terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga nantinya akan mengurangi tingkat pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, 2001, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Ghozali,. Imam 2009. *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Jhingan, M.L, 1996, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Penerbit PT.RajaGrafindo, Jakarta.
- Kuncoro,.,Mudrajad,2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Penerbit UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Lee, Robert D and Ronald W.Johnson, 1998, *Public Budgeting System 6th Edition*, AN Asper Publication Gaithering
- Mangkusubroto, Guritno, 1998, *Ekonomi Publik*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Murni, Asfiah (2006), *Ekonomika Makro*, Penerbit PT.Rafika Aditama, Bandung.
- Mankiw, N.Gregory, 2007, *Teori Ekonomi Makro*, Edisi 4, Penerbit Erlangga Jakarta
- Suparmoko, Irawan, (1996) *Ekonomika Pembangunan*, BPFE Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono, 2006, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Maharani Kurnia dan Isnowati Sri, 2014, *Kajian Investasi ,Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah* – Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Volume 21 Nomor 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas StikuBank Semarang
- Todaro, Michael P,& Stephen C.Smith, 2006, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Ke-9 Jilid, Penerbit Erlangga Jakarta